E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://epaper.dpr.go.id

Judul : Dukungan bank dunia percepat rehabilitasi
Tanggal : Kamis, 17 Februari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

MANGROVE

Dukungan Bank Dunia Percepat Rehabilitasi

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia menginisiasi proyek mangrove untuk ketahanan daerah pesisir seluas 75.000 hektar di empat provinsi hingga 2026 guna mempercepat program rehabilitasi mangrove. Pengelolaan mangrove ini akan dilakukan dengan beberapa pola atau teknik rehabilitasi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dyah Murtiningsih menyampaikan, upaya mempercepat rehabilitasi mangrove diwujudkan dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Bank Dunia. Proyek yang akan dilakukan yakni Mangrove untuk Ketahanan Daerah Pesisir (Mangrove for Coastal Resilience Project).

”Proyek ini akan merehabilitasi mangrove seluas 75.000 hektar. Selain itu, akan dilakukan juga program kegiatan pengelolaan lanskap mangrove dan penguatan kebijakan serta kelembagaan mangrove nasional,” ujar Dyah dalam acara konsultasi publik proyek mangrove untuk ketahanan daerah pesisir, Rabu (16/2/2022), di Jakarta.

Menurut Dyah, proyek ini tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Pelaksanaan proyek ini perlu pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan tetap memperhatikan kondisi tapak sesuai dengan tipologinya.

Peran dan partisipasi masyarakat juga menjadi tujuan pengembangan proyek ini. Pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada penambahan pendapatan melalui

usaha-usaha produktif berbasis ekosistem pada akhirnya akan mampu meningkatkan ketahanan atas ancaman perubahan iklim.

”Kapasitas masyarakat yang terlibat dalam proyek ini diharapkan dapat meningkat seiring dengan membaiknya ekosistem mangrove dan munculnya alternatif baru mata pencarian masyarakat. Pada prinsipnya, tujuan program ini ialah menstimulus masyarakat di tingkat tapak untuk menerima estafet pengelolaan mangrove ke depan,” tuturnya.

Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Satyawan Pudyatmoko mengatakan, area potensial rehabilitasi mangrove untuk proyek ini mencapai 88.828 hektar (ha).Area initersebar di empat provinsi, yakni Sumatera Utara (11.083 ha), Riau (7.337 ha), Kalimantan Utara (28.767 ha), dan Kalimantan Timur (41.641 ha).

Berdasarkan tipologinya, area rehabilitasi ini terdiri dari lahan terbuka, mangrove kerapatan jarang dan sedang, mangrove terabrasi, serta tambak vegetasi. Setiap tipologi degradasi mangrove memiliki teknik rehabilitasi yang berbeda-beda karena gangguan pengelolaannya juga beragam. Rehabilitasi mangrove juga tidak bisa dilakukan dengan cara menanam dan ditinggal. Rehabilitasi mangrove harus diiringi dengan pemeliharaan selama 3-5 tahun sehingga tanaman tersebut sudah tegak dengan sempurna.

Hal terpenting lainnya agar rehabilitasi tidak sia-sia yaitu dengan memastikan siapa pihak yang mengelola, bagaimana pengelolaannya, dan keterampilan apa yang dibutuhkan. Ketika mangrove tersebut sudah tumbuh, kegiatan yang dilakukan tidak sebatas menanam, tetapi juga memperkuat koordinasi pengelolaan lanskap dari tingkat kabupaten/kota hingga desa.

”Tanpa melibatkan desa, jangan berharap restorasi dan rehabilitasi bisa berlanjut,” tutur Satyawan. (MTK)